



USULAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN
UMUM (*PRINCIPLE OF PUBLIC SERVICE*) DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT DAERAH
(SETDA) KABUPATEN PURBALINGGA**

BIDANG KEGIATAN :

PKM-PENELITIAN

Dusulkan Oleh :

Ayon Diniyanto	8111413146 / 2013
Conigiya Simarmata	8111413133 / 2013
Kunta Anjana	8111413144 / 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- | | |
|--|---|
| 1. Judul Kegiatan | : Analisis Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (<i>Principle Of Public Service</i>) dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga |
| 2. Bidang Kegiatan | : PKM-P |
| 3. Ketua Pelaksana Kegiatan/ Penulis Utama | |
| a. Nama Lengkap | : Ayon Diniyanto |
| b. NIM | : 8111413146 |
| c. Jurusan | : Hukum |
| d. Universitas | : Universitas Negeri Semarang |
| e. Alamat Rumah dan No Tel./HP | : Desa Onje RT 03/1 Mrebet Purbalingga/085726349462 |
| f. Alamat email | : ayondiniyanto@yahoo.co.id |
| 4. Anggota Pelaksana Kegiatan/ Penulis | : 2 orang |
| 5. Dosen Pendamping | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | : Dani Muhtada, Ph.D. |
| b. NIDN | : 0015047810 |
| c. Alamat Rumah dan No Tel./HP | : Ngaliyan Semarang/081289087078 |
| 6. Biaya Kegiatan Total | : Rp12.390.000,00 |
| a. Dikti | : Rp12.390.000,00 |
| b. Sumber lain | : - |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 5 bulan |

Semarang, 28 September 2015

Menyetujui,
Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Ketua Pelaksana Kegiatan



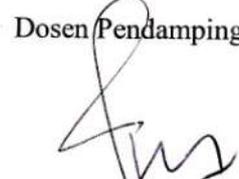
Ayon Diniyanto
NIM. 8111413146

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.
NIP. 19601217986011001

Dosen Pendamping



Dani Muhtada, Ph.D.
NIDN. 0015047810

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Luaran yang Diharapkan.....	2
1.5 Kegunaan Program.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Asas	4
2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	4
2.3 Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (<i>Principle of Public Service</i>)	4
2.4. Pemerintahan Daerah/ Kabupaten	5
2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan	5
2.6. Sekretaris Daerah (Setda)	5
BAB III METODE PENELITIAN	6
3.1 Lokasi Penelitian.....	6
3.2 Waktu Penelitian.....	6
3.3 Metode Penelitian	6
3.4 Pengambilan Data	6
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
4.1 Anggaran Biaya	9
4.2 Jadwal Kegiatan.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	11
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	14
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	16
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan	17

RINGKASAN

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau biasa disebut AAUPB merupakan tolak ukur yang dapat diterapkan di instansi pemerintahan agar pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Penerapan AAUPB juga dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Sekretariat Daerah (Setda) sebagai instansi pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah khususnya Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang harus menjalankan AAUPB. Namun pelaksanaan AAUPB di lingkungan Sekretariat Kabupaten Purbalingga perlu diteliti dan dianalisis dengan menggunakan standar AAUPB yang terdapat di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga menggunakan AAUPB atau tidak dalam menjalankan kewajiban. Karena AAUPB mempunyai macam-macam asas maka dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah terkait penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*). Hal ini dikarenakan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*) merupakan asas yang sangat penting dalam rangka pelayanan publik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga. Serta mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga dengan indikator AAUPB khususnya mengenai Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*). Kemudian luaran dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle Of Public Service*) dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan jurnal nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga, akademisi dan masyarakat.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu lima bulan. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebesar Rp12.390.000,00.

Kata kunci: *AAUPB; Sekretariat Daerah (Setda); Kabupaten Purbalingga.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergeseran konsepsi *nachwachterstaat* (negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah (Ridwan, 2013). Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri sendiri melalui *freies Ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara (Ridwan, 2013). Karena dengan *freies Ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam *onrechmatig overhaisdaad*, *detournment de pouvoior*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara (Ridwan, 2013).

Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan harus diatasi melalui sebuah peraturan perundang-undangan sebagai asas legalitas. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang memuat asas legalitas masih terdapat kelemahan dan kekurangan diantaranya yaitu terciptanya *freies Ermessen* yang dapat menciptakan *detournment de pouvoior*. Untuk itu perlu adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disingkat dengan sebutan AAUPB (Ridwan 2013).

AAUPB merupakan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. AAUPB merupakan tolak ukur yang dapat diterapkan di instansi pemerintahan agar pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Penerapan AAUPB juga dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Sekretariat Daerah (Setda) sebagai instansi pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah khususnya Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang harus menjalankan AAUPB. Namun pelaksanaan AAUPB di lingkungan Sekretariat Kabupaten Purbalingga perlu diteliti dan dianalisis dengan menggunakan standar AAUPB yang terdapat di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga menggunakan AAUPB atau tidak dalam menjalankan kewajiban. Karena AAUPB mempunyai macam-macam asas maka dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah terkait penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of*

Public Service). Hal ini dikarenakan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*) merupakan asas yang sangat penting dalam rangka pelayanan publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga ?
2. Apakah proses penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga menggunakan AAUPB khususnya mengenai Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*) ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis proses penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga dengan indikator AAUPB khususnya mengenai Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*).

1.4 Luaran yang Diharapkan

1. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan sebuah analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle Of Public Service*) dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan jurnal nasional.

1.5 Kegunaan Program

Manfaat yang diharapkan dari terlaksanakannya program ini adalah :

a. Bagi Pemerintah

1. Mengembangkan institusi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai AAUPB khususnya Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*). Dijadikan pelajaran untuk memperbaiki wilayahnya.
2. Sebagai sarana untuk berkomunikasi antara masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga.

b. Bagi Masyarakat

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga.

2. Dapat dijadikan artikel atau produk penelitian yang berguna bagi masyarakat umum.
- c. Bagi Akademisi
1. Meningkatkan kreatifitas para akademisi.
 2. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
 3. Memberikan kontribusi pengembangan pada bidang studi ilmu hukum, artikel ilmiah dalam jurnal dan peningkatan kualitas penelitian mahasiswa yang kompetitif dalam bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
 4. Menjadikan bahan ajar bagi para pelajar.
 5. Menajdikan para pelajar lebih kritis dalam menanggapi isu lingkungan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asas

Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat pihak-pihak. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplensif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes (Sutrisno, 2011).

2.2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Ridwan HR adalah “Asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang” (Ridwan, 2013).

AAUPB yang telah dirumuskan oleh para penulis Indonesia, khususnya Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun. Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut, adalah sebagai berikut.

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. Asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
- i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. Asas meniadakan suatu akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuld decision*);
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*)
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*); (Ridwan, 2013)

2.3. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern (*welfare state*), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) warga negaranya (Ridwan, 2013).

2.4. Pemerintahan Daerah/Kabupaten

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 3 UU No 23/2014)

2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. (Pasal 2 UU No 23/2014).

2.6. Sekretariat Daerah (Setda)

Menurut Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy Sekretaris daerah merupakan unsur staf pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati). Sekretaris daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah kabupaten misalnya: pengkoordinasian perangkat daerah, penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, keuangan, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (Soeharyo dan Efendi, 2009).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling tepat dan paling erat kaitannya dengan rumusan masalah diatas dalam hal memberikan data, informasi dan kelengkapan penelitian bagi penulis.

3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian pengambilan data akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima bulan.

3.3 Metode Penelitian

Penyusunan proposal ini akan didahului dengan suatu penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal ini peneliti membawa daftar pertanyaan sebagai acuan dalam pengambilan data dari responden. Kemudian peneliti menguraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Selain itu untuk memperkuat data yang dicari, peneliti mengambil beberapa gambar dan melakukan observasi. Observasi dilakukan dengan mengacu pada lembar observasi. Observasi yang dilakukan antara lain observasi mengenai mengenai segala hal yang berkaitan dengan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di sekretariat daerah (setda) Kabupaten Purbalingga.

3.4 Pengambilan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer yang dari penelitian ini adalah data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

2) Data Sekunder

Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, sumber internet yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka. Pewawancara selalu menjadi pihak yang bertanya, dan narasumber selalu menjadi pihak yang menjawab pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang merupakan

garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Narasumber tersebut antara lain Bupati Purbalingga, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengamat kebijakan publik Kabupaten Purbalingga, dan lain-lain.

2) Observasi

Dalam pelaksanaan observasi, peneliti memiliki pedoman observasi. Yaitu observasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di sekretariat daerah (setda) Kabupaten Purbalingga. Jenis observasi adalah observasi partisipatif dimana peneliti terjun langsung dengan obyek penelitian, namun hanya sebagian.

c. Validitas Data

Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik triangulasi berdasarkan sumber, yaitu karena kami melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah kami peroleh dengan membandingkan dan melakukan observasi kembali kepada narasumber lain.

d. Teknik Analisis Data

1) Pengumpulan data

Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari Bupati Purbalingga, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengamat kebijakan publik Kabupaten Purbalingga, dan lain-lain.

2) Reduksi Data

Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam laporan penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif. Penyajian data disajikan dalam bab deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil pembahasan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan dengan melihat obyek penelitian, dan mempertanyakan kembali hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai narasumber, sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu peneliti saling mendiskusikan agar data yang diperoleh dan

penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

e. Menyimpulkan Hasil Penelitian

Penyimpulan dari penelitian ini terkait penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di sekretariat daerah (setda) Kabupaten Purbalingga.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

NO.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA (Rp)
1.	Peralatan penunjang	3.097.500
2.	Bahan habis pakai	4.956.000
3.	Perjalanan	3.097.500
4.	Lain-lain	1.239.000
JUMLAH		12.390.000

3.5 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Persiapan	√	√			
2	Survey Kondisi Sekitar Masyarakat	√				
3	Pelaksanaan Program Penelitian :					
	a. Perizinan	√	√			
	b. Observasi		√			
	c. Wawancara		√	√		
	d. Analisis Data			√		
	e. Penyelesaian Data			√		
4	Evaluasi			√	√	
5	Penyusunan Laporan				√	
6	Pengadaan				√	
7	Laporan Akhir					√

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Dikti Kemristekdikti. 2015 "*Panduan PKM Tahun 2015*". Jakarta : Ditjen Dikti Kemristekdikti.
- Doyin, Mukh dan Wagiran. 2012. Bahasa Indonesia, Pengantar Penulisan Karya Ilmiah. Semarang: UNNES PRESS.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali PRESS.
<http://www.purbalinggakab.go.id>
- Mahmud Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum, Edisi I Cetakan 5*. Jakarta: Kencana.
- PHM, Sutrisno. 2011. *Memahami Selayang Pandang Ilmu Hukum*. Semarang: UNNES PRESS.
- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi. 2009. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Tim BIC. 2014. *Karya Ilmiah, Teori dan Praktek*. Semarang: BIC.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota****A. Identitas Diri Ketua**

1	Nama Lengkap	Ayon Diniyanto
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	8111413146
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Purbalingga, 24 Desember 1994
6	E-mail	ayondiniyanto@yahoo.co.id
7	Nomor Telepon/HP	085726349462

B. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMA
Nama Institusi	SD N 1 Onje	SMP N 1 Bobotsari	SMK N 1 Purbalingga
Jurusan	-	-	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tahun Masuk-Lulus	2001-2007	2007-2010	2010-2013

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

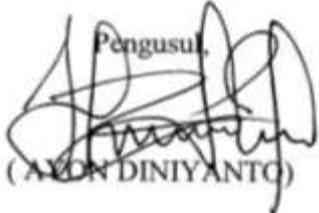
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 LKTIMN	BEM FKIP Universitas Riau	2015
2	Mahasiswa Berprestasi 3 FH UNNES	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	2015
3	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 28 September 2015

Pengusul,

 (AYON DINIYANTO)

A. Identitas Diri Anggota 1

1	Nama Lengkap	Conigiya Simarmata
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	8111413133
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pematang Siantar, 16 Oktober 1994
6	E-mail	conigiya.simarmata@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	083199410823

B. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMA
Nama Institusi	SD RK Budi Mulia I	SMP RK Budi Mulia	SMA RK Budi Mulia
Jurusan	-	-	IPS
Tahun Masuk-Lulus	2000-2006	2006-2009	2009-2012

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 28 September 2015

Pengusul,



(CONIGIYA SIMARMATA)

A. Identitas Diri Anggota 2

1	Nama Lengkap	Kunta Anjana
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	8111413144
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Brebes, 18 September 1994
6	E-mail	anjankunta18@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085747251013

B. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMA
Nama Institusi	SD N Jipang 1	SMP N 1 Bantarkawung	SMA N 1 Bantarkawung
Jurusan	-	-	IPA
Tahun Masuk-Lulus	2001-2007	2007-2010	2010-2013

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

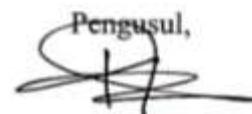
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Duta Anti Narkoba	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Brebes	2012
2	-	-	-
3	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 28 September 2015

Pengusul,


(KUNTA ANJANA)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan Penunjang

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Pengumpulan data	3 Hari	3 Kali	34.000	136.000
Proposal Penelitian	6 Bundel	6 Bundel	26.900	162.400
Perijinan kegiatan	2 Hari	2 Kali	100.000	200.000
Sosialisasi	3 Hari	3 Kali	638.000	1.914.000
Sewa Kamera	5 Bulan	20 Kali	337.000	337.000
Analisis	6 Hari	3 Kali	100.000	300.000
Kertas HVS	5 Bulan	1 Rim	48.100	48.100
SUBTOTAL				3.097.500

2. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Kertas	Print	2 Rim	50.000	100.000
Internet	50 Kali	50 Jam	3.000	150.000
Proposal dan Laporan lainnya	10 Bundel	3 Kali		750.000
Cetak Foto	5 Bulan	100 Lembar	6.000	300.000
Konsumsi	30 Hari	3 orang x 30 Hari	15.000	1.350.000
Sewa tempat	Seminar	4 Kali	375.000	1.500.000
Sewa peralatan	Seminar	4 Kali	201.500	806.000
SUBTOTAL				4.956.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
Pra Survey	Semarang-Purbalingga	3 orang	206.500	619.500

Survey	Semarang-Purbalingga	3 orang	206.500	619.500
Perizinan	Semarang-Purbalingga	3 orang	206.500	619.500
Observasi	Semarang-Purbalingga	3 orang	206.500	619.500
Wawancara	Semarang-Purbalingga	3 orang	206.500	619.500
SUBTOTAL				3.097.500

4. Lain-lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1. Alat tulis	Administrasi	4 Jenis	15.000	60.000
2. Plakat	Kenang-kenangan	5 Buah	30.000	150.000
3. MMT	Dokumentasi	2 Buah	75.000	150.000
4. Artikel	Laoran Kemajuan	3 Bundel	8.200	24.600
5. Artikel	Laporan Akhir	3 Bundel	9.000	27.000
6. X-Benner	Dokumentasi	2 Buah	60.000	120.000
7. Artikel	Pembuatan Artikel	3 Bundel	6.000	18.000
8. Power Point, Blog dan Koran	Publikasi	1 Kali	77.400	77.400
9. Makan dan Snack	Akomodasi	17 Hari	36.000	612.000
SUBTOTAL				1.239.000

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Ayon Diniyanto	Ilmu Hukum	Hukum	8 jam / minggu	Perizinan Observasi Wawancara Penelitian Analisis Laporan
2	Conigiya Simarmata	Ilmu Hukum	Hukum	8 jam / minggu	Survey Observasi Wawancara
3	Kunta Anjana	Ilmu Hukum	Hukum	8 jam / minggu	Survey Observasi Laporan

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayon Diniyanto
NIM : 8111413146
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM - P saya dengan judul: **Analisis Penerapan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle Of Public Service*) dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga**

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 28 September 2015

Mengetahui,

Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan,

Dr. Bapuh Bud. Raharjo, M.Si.
NIP. 19601217086011001

Ayon Diniyanto
NIM. 8111413146